



Potensi USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI SULAWESI SELATAN

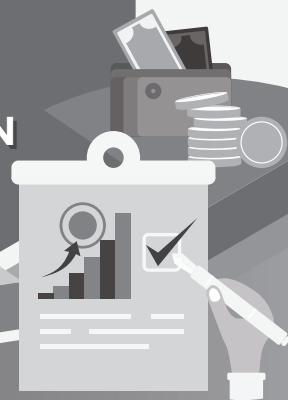


**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI SULAWESI SELATAN



**POTENSI USAHA MIKRO KECIL
SENSUS EKONOMI 2016**

No. ISBN: 978-602-438-212-4
No. Publikasi: 03220.1814
No. Katalog: 9102067

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm
Jumlah Halaman: vi + 34 halaman

Naskah: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Desain Kover oleh: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Tata Letak: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<https://sulsel.bps.go.id>

Kata Pengantar



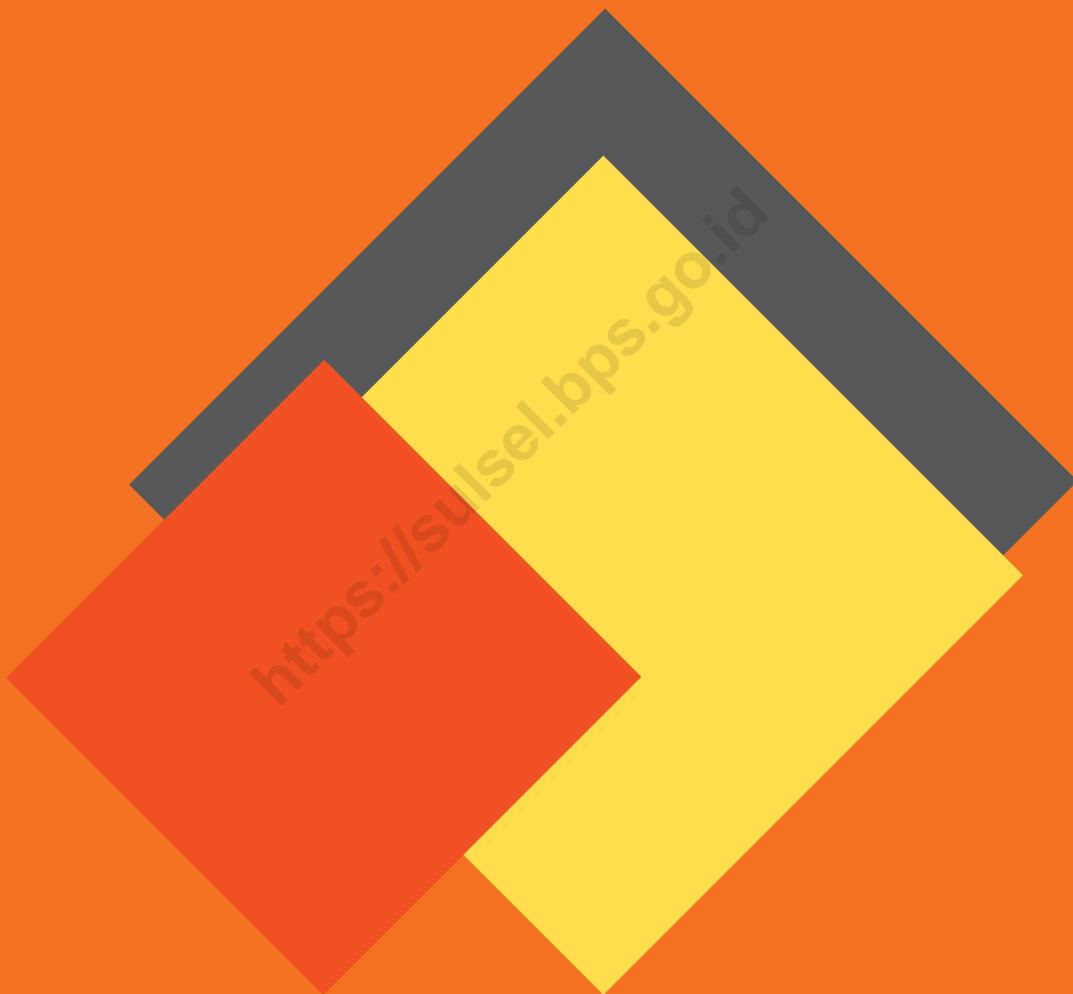
Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

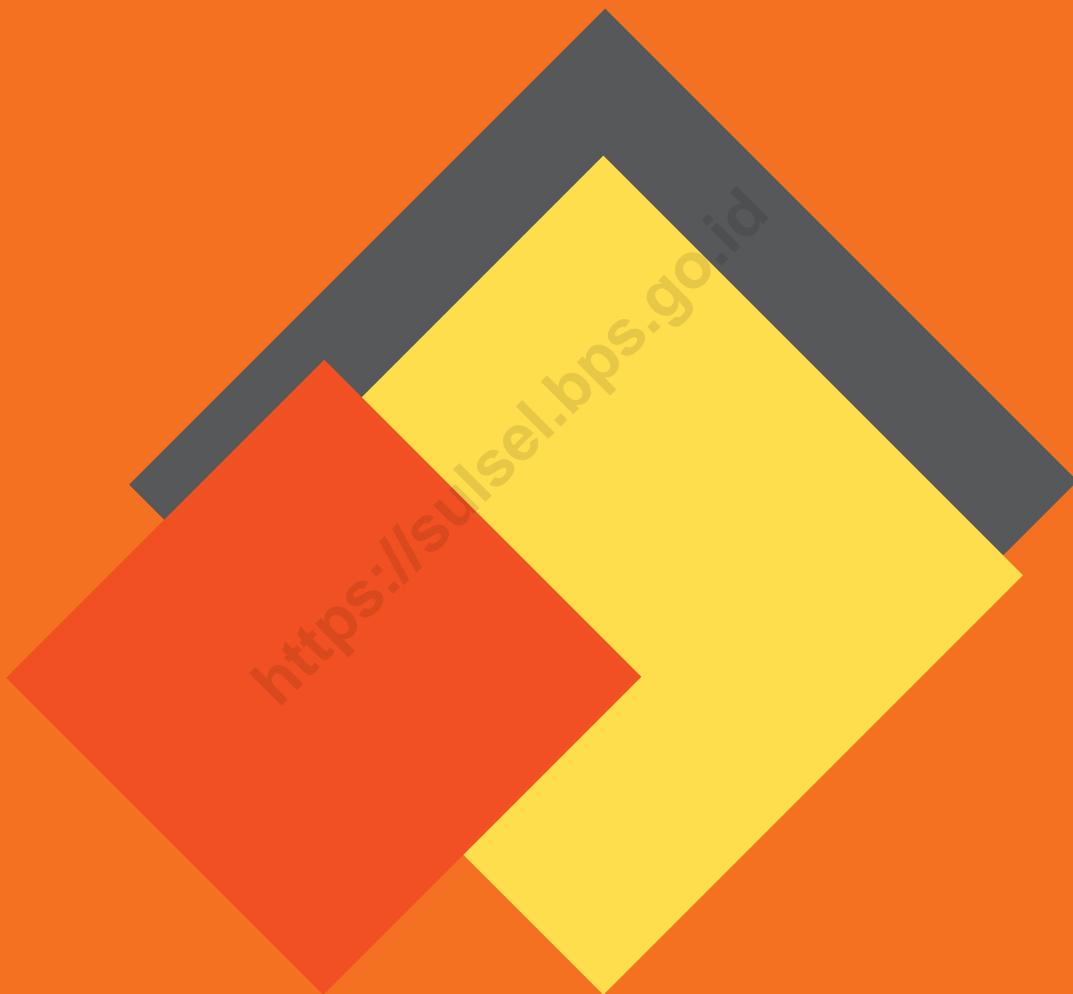
Makassar, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan

Yos Rusdiansyah



Daftar Isi

KATA PENGANTAR _____	III
DAFTAR ISI _____	V
PENDAHULUAN _____	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI INDONESIA ____	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK _____	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA _____	11
PELAKU UMK MAYORITAS PERORANGAN _____	17
AKSEBILITAS PERMODALAN UMK _____	21
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN _____	25
PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG _____	31



Pendahuluan

Dunia usaha Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Listing, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,33 persen dari total usaha nonpertanian di Indonesia. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Indonesia lebih dari 53 juta orang atau sekitar 76,28 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Sulawesi Selatan, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
SULAWESI
SELATAN

Bagian

1

<https://sulsel.bps.go.id>

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Sulawesi Selatan. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan.

Persentase UMK di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 98,90 persen dari total jumlah usaha nonpertanian yang tercatat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah lebih dari 517 ribu usaha atau mencapai lebih dari 56 persen. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) menjadi usaha terbanyak selanjutnya dengan jumlah usaha sekitar 14 persen. Sedangkan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) menjadi usaha terbanyak ketiga dengan jumlah usahanya hampir 10 persen dari total jumlah UMK yang

ada di Sulawesi Selatan.

Sebagai ibukota provinsi, Kota Makassar menjadi pusat pergerakan ekonomi di Sulawesi Selatan. Lebih dari 34 persen perekonomian Sulawesi Selatan tergantung pada ekonomi Kota Makassar (PDRB 2017) Dari 24 kabupaten/kota, jumlah UMK di Kota Makassar mencapai 13,71 persen. Pada posisi kedua dan ketiga adalah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan jumlah UMK masing-masing 9,81 persen dan 8,55 persen.

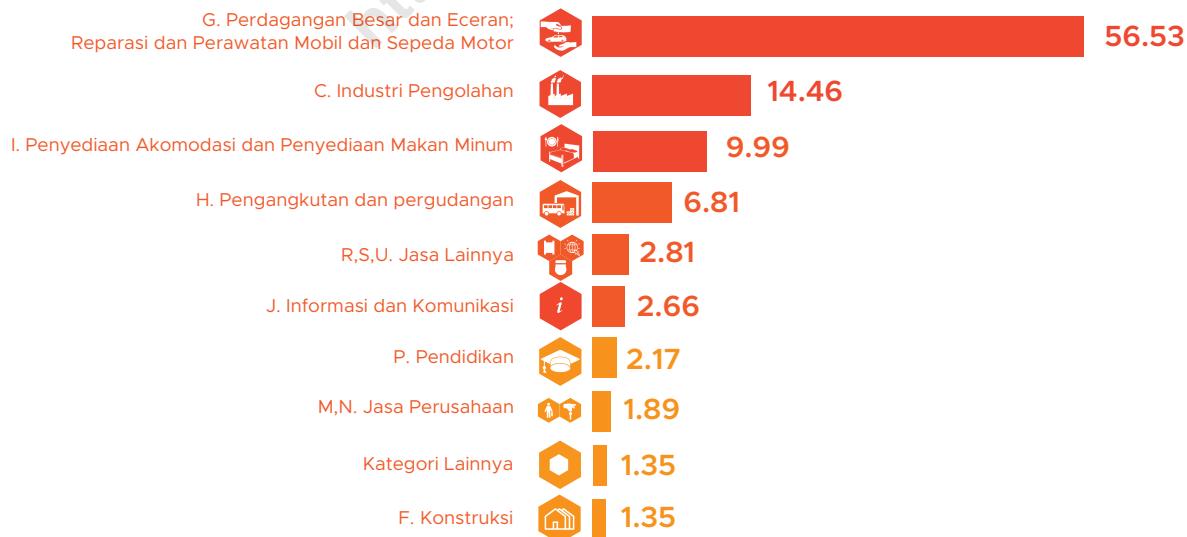
**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
SULAWESI SELATAN**

Gambar 1.1.
Persentase UMK Menurut Tahun Beroperasi di Sulawesi Selatan



Sumber: BPS, SE2016-L

Gambar 1.2.
Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori di Sulawesi Selatan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-L

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase UMK Menurut Pulau, 2016

Pulau	Persentase (%)
Selatan-Selatan (Kep. Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Sinjai)	16,66
Mamminasata (Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar)	30,75
Pangkep-Ajatappareng (Pangkep, Barru, Parepare, Pinrang, dan Enrekang)	13,82
Bosowasi (Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap)	23,43
Luwu dan sekitarnya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Tana Toraja, dan Toraja Utara)	15,34
Total	100,00



**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK**

Bagian

2

<https://sulsel.bps.go.id>

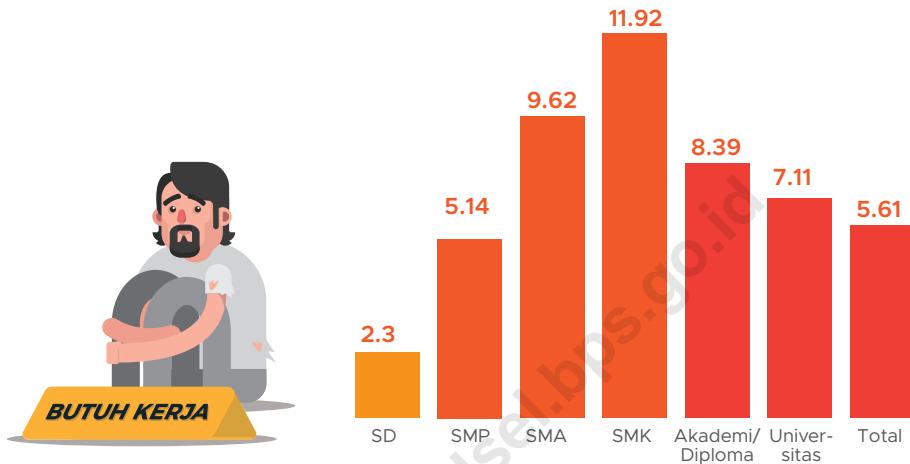
Jumlah UMK yang sangat besar di Sulawesi Selatan tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan Agustus 2017, pengangguran di Sulawesi Selatan mencapai 5,61 persen. Lebih dari 47 persen pengangguran di Sulawesi Selatan adalah lulusan pendidikan menengah (SMU dan SMK), dengan tingkat pengangguran 10,22 persen. Tingginya kontribusi lulusan menengah terhadap jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan salah satu disebabkan rendahnya keahlian soft skill khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji.

Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016-Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 2,1 juta orang atau sekitar 85,29 persen tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan.

Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) lebih dari 935 ribu orang atau mencapai lebih dari 44,69 persen dari tenaga kerja pada UMK. Usaha Industri Pengolahan (kategori C) dan Usaha Pendidikan (kategori P) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK, masing-masing 15,39 persen dan 11,07 persen. Secara-rata-rata per usaha, UMK kategori Pendidikan (kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 12 pekerja per usaha/perusahaan. Namun secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Sulawesi Selatan hanya sebesar 2 pekerja

UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK

Gambar 2.1.
Tingkat Pengangguran Sulawesi Selatan menurut Pendidikan,
2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 2.2.
Penyerapan Tenaga Kerja UMK di Sulawesi Selatan Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 2.
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian di Sulawesi Selatan Menurut Kategori, 2016

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
B. Pertambangan dan Penggalian	2.334	6.847	3
C. Industri Pengolahan	132.277	325.944	2
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	1.405	2.810	2
E. Pengelolaan Air. Pengelolaan Air Limbah. Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah. dan Aktivitas Remediasi	1.823	3.765	2
F. Konstruksi	12.362	97.075	8
G. Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	517.159	934.991	2
H. Pengangkutan dan Pergudangan	62.258	78.481	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	91.393	193.676	2
J. Informasi dan Komunikasi	24.327	37.442	2
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.619	12.039	5
L. Real Estat	3.231	5.342	2
M, N. Jasa Perusahaan	12.363	37.092	3
P. Pendidikan	19.813	231.843	12
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	5.821	62.693	11
R, S. Jasa Lainnya	25.686	65.720	3
Total	914.871	2.095.760	2

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**PENGELOLAAN
UMK DI
SULAWESI
SELATAN
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3

<https://sulsel.bps.go.id>

PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

Penerapan tenaga kerja yang besar UMK di Sulawesi Selatan memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dari UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari data SE2016 menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer. Di Sulawesi Selatan, jumlah UMK yang tidak berbadan hukum masih sangat mendominasi yaitu mencapai 94,73 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga

bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, hanya kurang dari 10 persen UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 9 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Di antara sektor nonpertanian di Sulawesi Selatan, UMK pada Kategori P (Pendidikan), Kategori K (Aktivitas Keuangan dan Asuransi), dan Kategori D (Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin) yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan hukum, penggunaan komputer dan pemanfaatan internet. Sementara dari aspek menjalin kemitraan, hampir semua kategori belum menjalin kemitraan secara optimal.

Gambar 3.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Usaha di Sulawesi Selatan, 2017



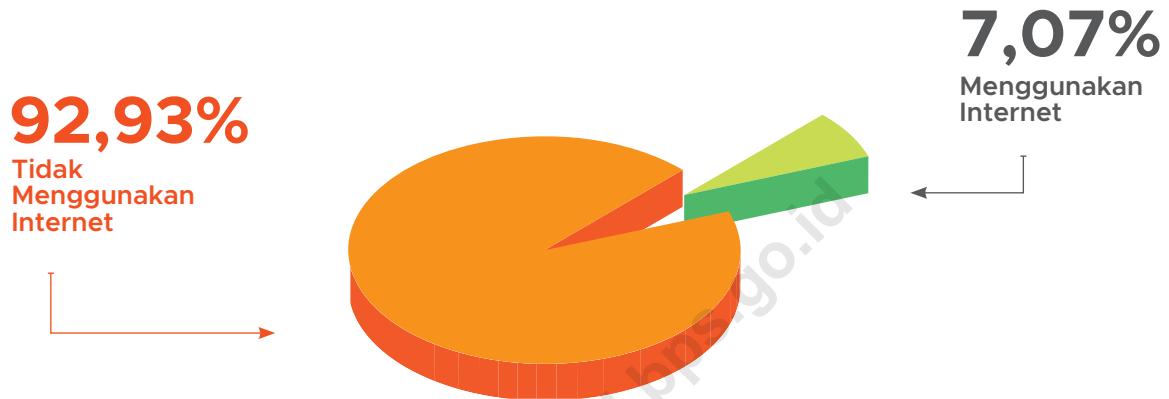
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penunaan Komputer dalam Usaha di Sulawesi Selatan, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha di Sulawesi Selatan, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan di Sulawesi Selatan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 3.

Persentase UMK yang Berbadan Hukum, Mempunyai Laporan Keuangan, Menggunakan Komputer, dan Menjalinkan Kemitraan di Sulawesi Selatan, 2017

Kategori	Berbadan Hukum	Mempunyai Laporan Keuangan	Menggunakan Komputer	Menjalinkan Kemitraan
B. Pertambangan dan Penggalian	8.1	0.51	1.16	3.9
C. Industri Pengolahan	4.39	3.06	5.13	9.36
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	12.38	58.01	58.36	30.68
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	4.33	3.84	3.35	9.54
F. Konstruksi	16.15	13.1	13.61	8.74
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3.28	2.15	4.19	9.37
H. Pengangkutan dan Pergudangan	2.31	0.69	2.53	3.71
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.12	2.17	4.49	2.93
J. Informasi dan Komunikasi	2.37	14.93	22.87	15.68
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	55.4	47.84	28.18	15.92
L. Real Estat	2.85	3.1	3.31	1.86
M, N. Jasa Perusahaan	11.5	38.26	32.84	12.62
P. Pendidikan	56.25	71.85	60.23	12.04
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	46.38	31.27	31.9	18.11
R, S. Jasa Lainnya	5.19	10.98	14.5	5.98
Total	5.27	5.32	7.07	8.57





**PELAKU
UMK DI
SULAWESI
SELATAN
PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

Bagian

4

<https://sulsel.bps.go.id>

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun, sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usahayangkecil danpengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang tenaga kerjanya adalah pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan sekitar 57,97 persen UMK di Sulawesi Selatan tenaga kerjanya adalah pekerja keluarga/tidak dibayar. Kategori yang paling banyak tenaga kerjanya pekerja keluarga/tidak dibayar adalah aktivitas Informasi dan Komunikasi (Kategori J), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) dan Pengangkutan dan Pergudangan (Kategori H).

Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK di Sulawesi Selatan yang berjenis kelamin perempuan hampir mencapai 51 persen. Artinya, persentase pengusaha UMK berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding pengusaha laki-laki. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika UMK dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

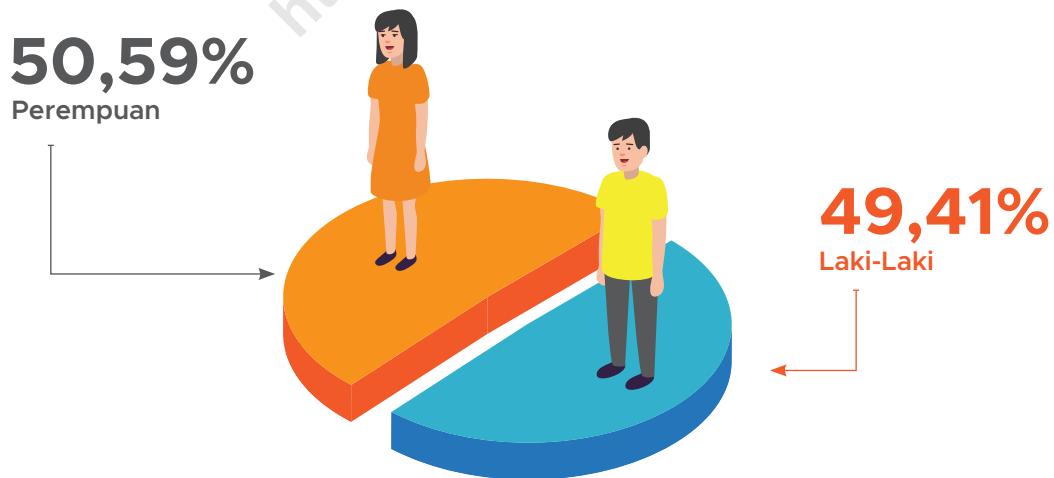
Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK di Sulawesi Selatan masih rendah. Lebih dari 35 persen pengelola berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Pengelola dengan pendidikan SMA dan SMK juga cukup besar, lebih dari 30 persen. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti, misalnya dengan memberikan pelatihan. Sayangnya, hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa pelaku UMK yang pernah mengikuti pelatihan hanya 4,13 persen.

**PELAKU
UMK
MAYORITAS
PERORANGAN**

Gambar 4.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan, 2017



Gambar 4.2.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan, 2017



Gambar 4.3.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan di Sulawesi Selatan, 2017



Tabel 4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Status Tenaga Kerja, 2016

Kategori	Dibayar	Tidak Dibayar
C. Industri Pengolahan	49.15	50.85
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	19.45	80.55
H. Pengangkutan dan pergudangan	21.7	78.3
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	33.4	66.6
J. Informasi dan Komunikasi	10.39	89.61
L. Real Estat	22.23	77.77
M,N. Jasa Perusahaan	69.53	30.47
P. Pendidikan	97.15	2.85
R,S,U. Jasa Lainnya	61.43	38.57
Kategori Lainnya	385.72	214.28

**KINERJA
USAHA
DARI SISI
KEUANGAN**

Bagian

5

<https://sulsel.bps.go.id>

Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, perolehan laba UMK di Sulawesi Selatan menunjukkan capaian yang positif meskipun beberapa usaha dipandang mengalami penurunan. Sekitar 19 persen pengusaha UMK menyatakan bahwa keuntungan mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, sektor UMK di Sulawesi Selatan mampu menghasilkan omset/pendapatan mencapai lebih dari Rp 165 triliun.

Selain laba usaha, rasio pengeluaran terhadap pendapatan (cost to income) juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada infografis dapat terlihat bahwa UMK di Kota Palopo adalah yang paling profitable di Sulawesi Selatan dengan rasio 0,34. Sektor UMK di kota ini mampu mengais keuntungan hingga dua kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, rasio pengeluaran tertinggi ada di Kabupaten Pinrang dengan rasio 0,73.

Jika dicermati lebih jauh menggunakan kategori lapangan usaha, Kategori L (Real Estat)

dan G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,36 dan 0,37. UMK pada kategori-kategori tersebut mampu mendulang pendapatan hingga hampir dua kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sedangkan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi ada pada Kategori Pendidikan dan Informasi dan Komunikasi dengan rasio mencapai 0,81.

Namun demikian, Kategori, L, dan G bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja yang tertinggi. Aktivitas Pendidikan (Kategori P) memiliki nilai balas jasa pekerja tertinggi, yaitu hampir 29 juta per pekerja. Selanjutnya, Kategori Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial) dan Kategori L (Real Estat) memberikan balas jasa masing-masing 27 juta dan 25 juta per pekerja.

Tabel 6.1.
Banyaknya Usaha/Perusahaan dan Rasio Pengeluaran terhadap
Pendapatan UMK Menurut Wilayah di Sulawesi Selatan

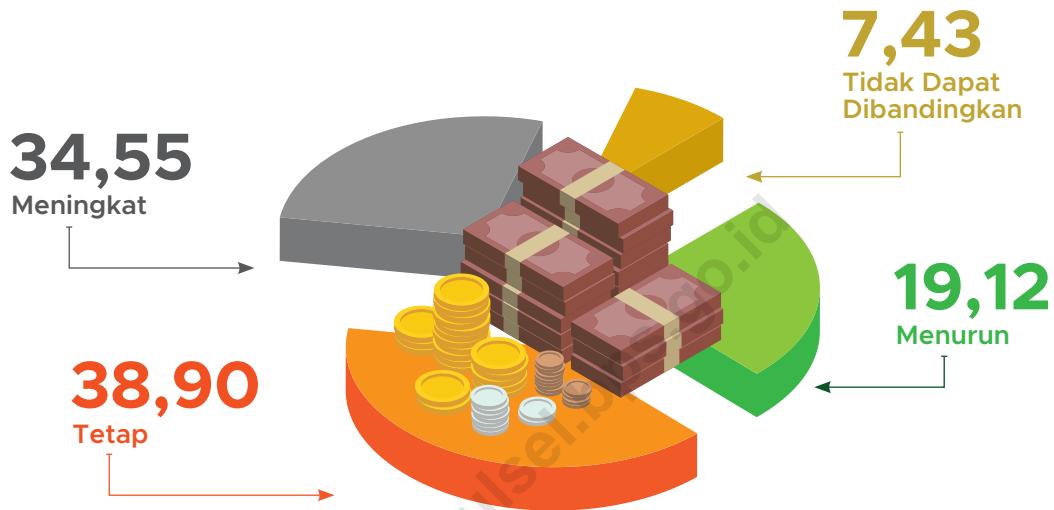
Pulau	Terendah	Banyaknya Usaha	Rasio Pengeluaran Terhadap Pendapatan	Tertinggi	Banyaknya Usaha	Rasio Pengeluaran Terhadap Pendapatan
Selatan-Selatan (Kep. Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Sinjai)	Jeneponto	41.988	0,59	Bulukumba	44.056	0,68
Maminasata (Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar)	Makassar	125.432	0,56	Maros	36.753	0,63
Ajatappareng (Pangkep, Barru, Parepare, Pinrang, dan Enrekang)	Pangkep	33.154	0,57	Pinrang	39.365	0,73
Bosowasi (Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap)	Bone	89.759	0,56	Wajo	62.925	0,62
Luwu Raya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Tana Toraja, dan Toraja Utara)	Palopo	15.086	0,34	Luwu Utara	26.753	0,72

Rasio pengeluaran terhadap pendapatan menunjukkan tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin menguntungkan atau semakin baik kinerja keuangannya

Pinrang merupakan kabupaten dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi se-Sulawesi Selatan

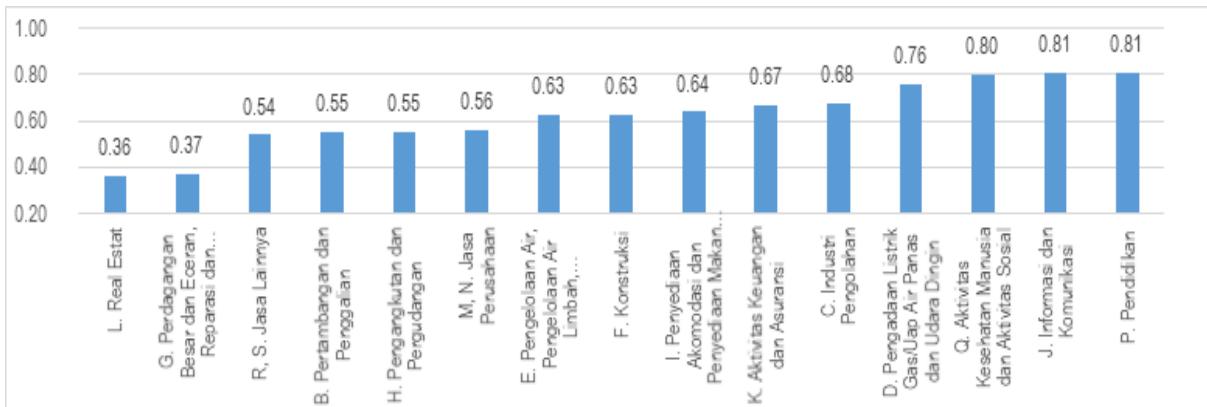
Palopo merupakan kota dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan terendah se-Sulawesi Selatan

Gambar 5.1.
Persentase UMK di Sulawesi Selatan menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



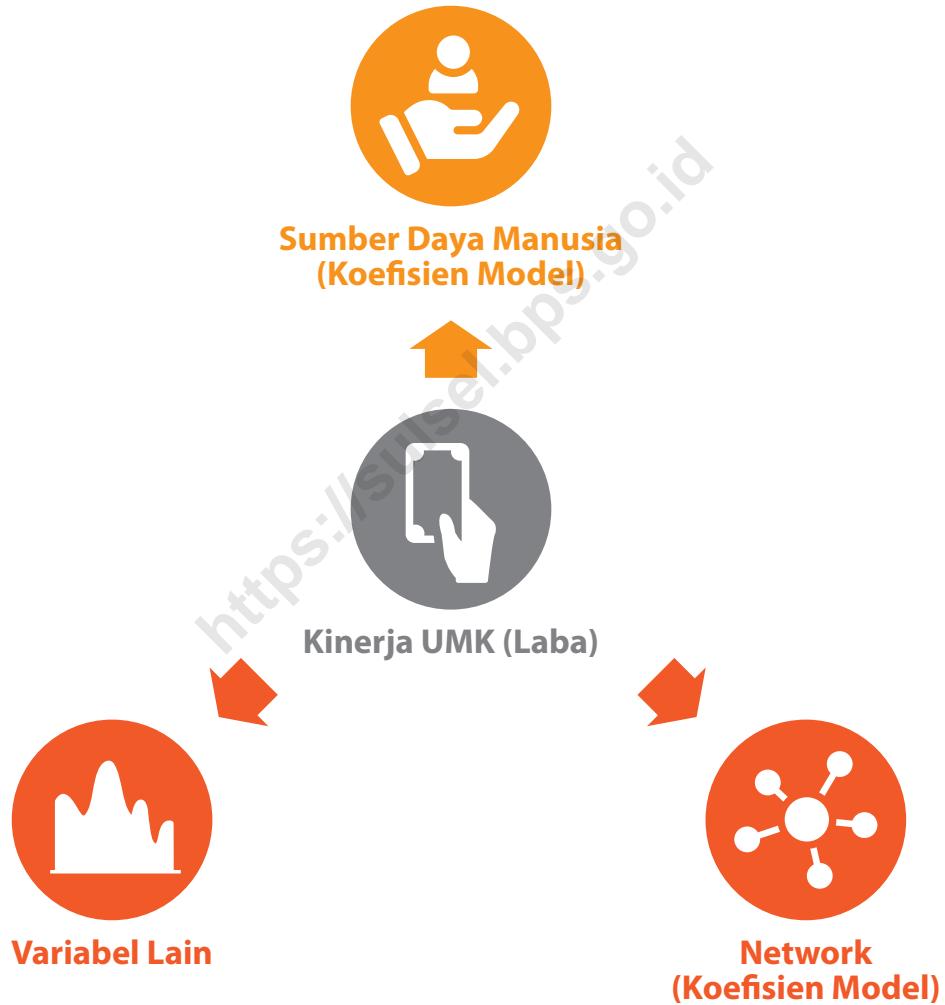
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2.
Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan menurut Kategori di Sulawesi Selatan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.3.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha UMK





PROSPEK DAN KENDALA USAHA

Bagian

6

<https://sulsel.bps.go.id>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pengusaha UMK di Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar 49 persen.

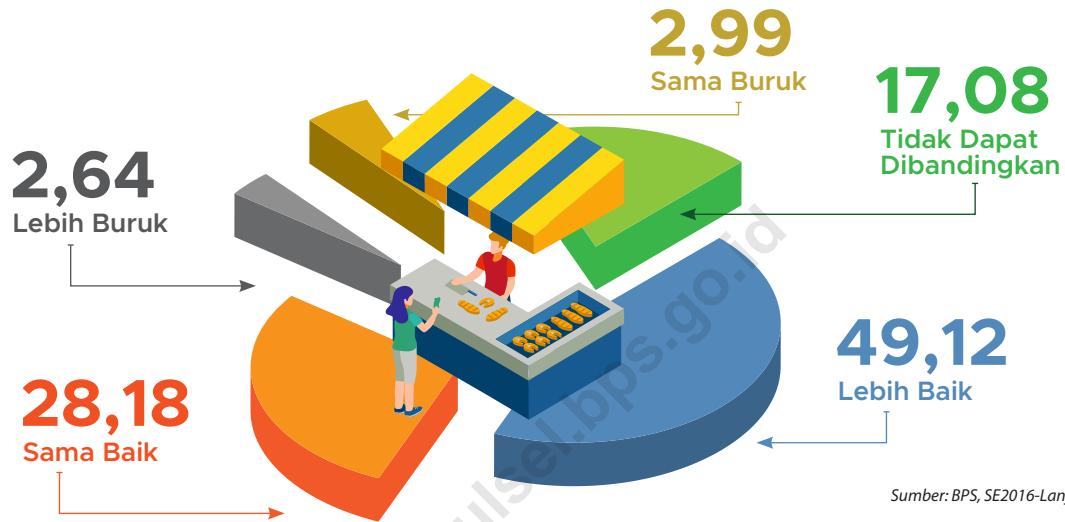
Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. Hampir 90 persen UMK di Sulawesi Selatan memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Permasalahan permodalan/likuiditas dan adanya pesaing merupakan kendala utama yang dihadapi. Lebih dari 50 persen pengusaha UMK menyatakan memiliki kendala tersebut.

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan

kapasitas usahanya. Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMKM sebetulnya sudah sangat terbuka. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015). Namun masih kurang dari 15 persen usaha UMK di Sulawesi Selatan yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. 47 persen UMK tidak mengajukan kredit melalui lembaga keuangan dengan alasan merasa belum perlu untuk mengajukan kredit. Sedangkan bagi pengusaha yang membutuhkan kredit namun belum mengajukan/mendapatkan kredit adalah karena alasan bunga tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, prosedur sulit, dan usulan ditolak.

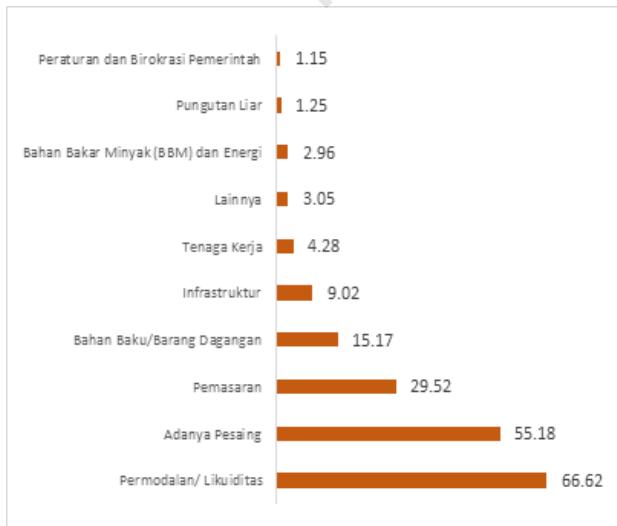
**PROSPEK
DAN KENDALA
USAHA**

Gambar 6.1.
 Persentase UMK Menurut Prospek UMK di Sulawesi Selatan



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2.
 Presentase UMK yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala (persen) di Sulawesi Selatan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Haji Bau No.6 Makassar 90125 Sulawesi Selatan
Telp (0411) 854838 (Sentral), 872879, Faks (0411) 851225,
Email : pst7300@bps.go.id , Website : <http://sulsel.bps.go.id>